

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, bab ini akan memaparkan kesimpulan penelitian secara umum, sekaligus menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum hasil penelitian dalam studi ini menunjukkan hal-hal berikut:

Pertama, PDUK sebagai aktor dalam pengolahan sampah yang dapat memberdayakan masyarakat sekitar dengan cara mensejahterakan warga sekitar sebanyak 150 orang untuk bekerja di PDUK sebagai pemilah sampah yang hasilnya dapat mereka jual untuk memenuhi kehidupan mereka. Selain itu., memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mengolah sampah untuk bisa dijadikan pupuk kompos, serta menganjurkan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, memberikan peluang kerja kepada warga sekitar yang masih menganggur, memberikan pupuk dan pohon secara gratis kepada warga sekitar untuk penghijauan dan PDUK sebagai sarana edukasi untuk para pelajar dan mahasiswa ataupun untuk mereka yang sangat peduli terhadap masalah persampahan.

Kedua, hasil dari pemberdayaan tersebut menciptakan RW 012 sebagai RW percontohan dengan menggerakkan para pemuda dari Karang Taruna dan bapak-bapak RW 012 yang aktif dalam kebersihan lingkungan. RW 012 ini telah mendapatkan penghargaan dari Walikota Jakarta Timur pada tahun 2008. Pemberdayaan tersebut

membuat masyarakat mampu mengolah sampah menjadi pupuk kompos bahan organik dari daun-daun kering dan sampah dapur dengan tujuan untuk kelestarian lingkungan khususnya untuk RW 012. Pupuk kompos hasil buatan para warga RW 012 diperjual belikan secara usaha kecil-kecilan dengan harga Rp.5.000,- untuk 1 kilogram dan sisanya untuk menambah koleksi tumbuhan yang ada di RW 012.

Ketiga, adanya tempat pengolahan sampah ini menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya membuat masyarakat sekitar PDUK khususnya RW 012 diberdayakan oleh PDUK, tetapi negatifnya membuat lingkungan sekitar PDUK tercemar karena PDUK belum bisa mereduksi bau dari sampah tersebut. Alasan dari PDUK sendiri dikarenakan sampah ini belum terpisah dari sumbernya, sehingga menimbulkan bau akibat dari berbagai macam kandungan kimia dari sampah-sampah tersebut. Masyarakat belum disiplin dalam hal memilah sampah, kebanyakan dari masyarakat masih menempatkan sampah dalam satu wadah. Sebaiknya wadah sampah tersebut dipisah sesuai dengan jenis sampahnya, misal sampah organik, sampah anorganik dan sampah berbahaya dipisahkan dalam tiga wadah, sehingga para pengolah sampah dengan mudah melakukan pengolahan dan pupuk kompos yang dihasilkan benar-benar murni dari bahan organik. Selain menimbulkan bau yang mengganggu aktivitas warga, air sampah tersebut mengeluarkan air lindi yang dapat mencemar air tanah. Air lindi tersebut akan meresap kedalam tanah dan mengalir sesuai dengan urat air, sehingga air yang tidak tercemar akan terkontaminasi oleh air lindi tersebut.

Untuk masalah kesejahteraan para pekerja, PDUK akan lebih meningkatkannya walaupun sekarang belum secara efektif mensejahterakan para

pekerja. Di harapkan dengan menambah fungsi dari PDUK kesejahteraan para pekerja lebih meningkat lagi. Untuk sekarang fungsi dari PDUK hanya sebagai mengolah sampah menjadi pupuk kompos, tetapi untuk tahun 2012 fungsi yang baru akan segera direalisasikan dengan menambah ITF (Intermediate Treatment Facility) sampah diolah menjadi tenaga listrik.

Keempat, dari pemberdayaan dan pengolahan sampah terdapat beberapa kendala atau hambatan baik dari pemerintah (Dinas Kebersihan DKI Jakarta), tim pengelola PDUK dan masyarakat. Kendala yang dialami oleh Dinas Kebersihan berkaitan mengenai kebijakan dan teknis operasional. Untuk masalah kebijakan Dinas Kebersihan merumuskan beberapa faktor, diantaranya belum terbitnya peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari UU No.18/2008 sebagai landasan penyusunan peraturan daerah tentang pengolahan sampah untuk pengganti Perda 5/88, *masterplan* sistem pengelolaan sampah dalam kaitannya dengan tata ruang kota perlu disusun yang baru sebagai tindak lanjut review *masterplan* yang disusun pada tahun 2004/2005, belum jelasnya pemisahan antara fungsi regulator dan operator di dalam pengelolaan sampah, alokasi anggaran untuk sektor persampahan masih belum prioritas mengingat bukan *dedicated program*, kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendidikan masyarakat tentang masalah kebersihan belum dapat dilakukan secara profesional karena keterbatasan anggaran, koordinasi instansi terkait di tingkat provinsi maupun ditingkat nasional masih perlu ditingkatkan atau disinkronkan, minimnya pakar dibidang persampahan baik ditingkat nasional maupun internasional yang bisa menghasilkan strategi pengolahan sampah, masih lemahnya penegakan hukum dibidang kebersihan dan kurangnya dukungan dari masyarakat terhadap

pelaksanaan program pemilahan sampah dari sumber sampah (masyarakat) di Provinsi DKI Jakarta.

Untuk masalah teknis operasional Dinas Kebersihan merumuskan beberapa faktor, diantaranya volume timbulan sampah pada tahun 2008 sebesar 29.676,24 meter³ atau 6.594,72 ton per hari dan diprediksikan akan terus meningkat rata-rata naik 5 % per tahun dan peran serta masyarakat dalam melakukan program 3R masih kurang untuk dapat mereduksi volume timbulan sampah. Rata-rata jumlah sampah terangkut adalah 93,35 % dari total timbulan sampah akibat dari jumlah armada milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kurang dan 40 % kondisinya sudah tidak layak jalan.

Kelima, peneliti melihat adanya sebuah pembangunan berkelanjutan di PDUK. Di mana, PDUK menjelaskan bahwa sampah tidak akan mati dan pembangunan akan terus berlanjut tanpa dipengaruhi oleh isu-isu yang sedang berkembang. Menurut pemikiran Emil Salim yang menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dasar dan ide-ide pokok yang mendasari pembangunan berkelanjutan, yaitu proses pembangunan itu mesti berlangsung secara berlanjut, terus menerus, kontinu, ditopang oleh sumber daya alam, dijamin dengan kualitas lingkungan dan manusia yang terus berlanjut.

Pembangunan berkelanjutan muncul dengan terlebih dahulu menjelaskan pandangan-pandangan tentang lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat yang meliputi tiga tahapan, yakni lingkungan adalah untuk pembangunan ekonomi, lingkungan untuk keperluan manusia dan lingkungan untuk lingkungan. Dalam persoalan pembangunan memiliki dua sisi yang seharusnya selaras. Pada satu sisi, ia

dianggap sebagai indikator kemajuan umat manusia, sebab manusia telah memiliki upaya-upaya sistematis tertentu demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Sisi lain, keberlanjutan lingkungan dan bentuk perubahan masyarakat (pengembangan sosial) menjadi penting dan merupakan agenda yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Keenam, Untuk tetap bermitra dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, maka PDUK menjalankan beberapa strategi. Strategi ini diharapkan dapat memperlancar hubungan PDUK dengan Dinas Kebersihan DKI Jakarta, diantaranya menjalankan tugas sesuai dengan kuota yang telah diberikan, PDUK mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, PDUK selalu menciptakan produk kompos berkualitas yang memenuhi prasyarat dan harapan pelanggan, memperluas daerah distribusi kompos, pengelolaan yang baik, PDUK akan menambah fungsinya bukan hanya untuk kompos dan ballapress saja, tetapi menambahkan fungsinya untuk menciptakan sampah menjadi pembangkit tenaga listrik di tahun 2012.

Ketujuh, bentuk kemitraan yang dilakukan PDUK dengan masyarakat sekitar dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu membantu masyarakat dalam hal ketenagakerjaan sampai kapan pun kepada warga yang menganggur, memberdayakan masyarakat sekitar khususnya para pemulung untuk mencari nafkah di PDUK, memberikan pupuk kompos secara gratis kepada warga untuk memperbaiki lingkungan khususnya RW 012, memberdayakan masyarakat RW 012 untuk mengolah sampah menjadi pupuk kompos, pembuangan sampah secara gratis khususnya untuk warga RW 012, memberikan bantuan dana yang digunakan untuk memperbaiki lingkungan sekitar dan bakti sosial kepada masyarakat.

C. Saran

Dalam membangun, memberdayakan masyarakat sekitar PDUK, serta mensejahteraan para karyawan maka diperlukan suatu langkah yang optimal dari pemerintah dan PDUK sendiri. Dalam bagian ini penulis mencoba memberikan sedikit rekomendasi guna mengembangkan kesejahteraan para pekerja PDUK. Peningkatan kesejahteraan para pekerja PDUK tentu berdampak kepada pembangunan PDUK itu sendiri, seperti: *pertama*, kesejahteraan para karyawan meningkat, maka PDUK ini menjadi semakin lebih baik. Para pekerja membutuhkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan. Di mana, para pekerja ini setiap harinya berkecimpung dengan sampah yang banyak menimbulkan penyakit, jika kesehatan para pekerja tidak baik, maka aktivitas di PDUK terhambat. Sehingga, PDUK perlu mengadakan dokter khusus untuk menangani para pekerja. Setiap hari kerja, dokter ini selalu ada di PDUK dan siap melayani para pekerja yang mengalami gangguan kesehatan. Pengobatan ini harus dilakukan secara gratis mengingat PDUK sendiri merupakan industri skala besar dan mendapatkan keuntungan secara besar pula. Tanpa adanya para pekerja, maka kelangsungan PDUK tidak akan berjalan. Oleh karena itu, dibutuhkan kenyamanan kerja supaya para pekerja tidak ada yang keluar atau mencari pekerjaan yang lain.

Selain itu, semua para pekerja dan para pemulung harus dilindungi dengan asuransi kecelakaan dan kesehatan karena untuk menghindari dari resiko kecelakaan pada saat bekerja. Bekerja di PDUK ini mempunyai resiko yang sangat besar karena memiliki banyak alat-alat berat, sehingga resiko kecelakaan sangat besar sekali. Semua para pekerja dan pemulung yang dilindungi dengan asuransi, apabila terjadi

kecelakaan pada saat bekerja, maka semua biayanya harus ditanggulangi oleh pihak PDUK.

Kedua, upah yang sesuai harus diperhatikan untuk para pekerja, jangan sampai pihak para pekerja merasa dirugikan dan hak-haknya tidak terpenuhi. Mengingat pekerjaannya yang beresiko dan tidak semua orang mau bekerja di sampah. Para pekerja ini mempunyai tugas yang mulia, yaitu memperbaiki lingkungan, agar sampah dapat diolah dan tidak menumpuk di TPST. Tanpa adanya para pekerja ini, maka sampah-sampah di kota Jakarta tidak dapat diolah. Sehingga, dibutuhkan upah yang sesuai yang dapat mensejahterakan hidup para pekerja. Di sini, antara pendapatan PDUK dengan upah para pekerja harus sesuai dengan keuntungan yang diperoleh dari PDUK, jangan sampai antara keuntungan PDUK dengan upah para pekerja tidak seimbang.

Ketiga, PDUK juga harus membuat situasi kerja yang nyaman dan rapih. Lokasi pengolahan sampah harus terlihat bersih, rapih dan tidak basah. Sampah-sampah yang akan diolah jangan berserakan disembarang tempat, sehingga air dari sampah tidak membuat lantai kotor dan becek. Para pekerja diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan, masker serta sepatu bot untuk menjaga kesehatan para pekerja dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terkena paku, pecahan beling dan benda-benda yang dapat membahayakan para pekerja.

Keempat, para pekerja PDUK harus ada peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya kearah yang lebih baik. Ini bertujuan untuk menghindari para pekerja dari kemiskinan. Contoh, yang tadinya menjadi pemulung meningkat menjadi pemilik lapak.

Kelima, untuk pemerintah dalam membuat undang-undang atau peraturan harus benar-benar dijalankan jangan peraturan tersebut dibuat tanpa ada tindakan lebih lanjut. Peraturan tersebut harus ada hasil dan perbaikan sebelum dan sesudah adanya undang-undang. Undang-undang tersebut jangan belaku di masyarakat saja, tetapi harus mencakup semua lapisan sosial baik itu pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat ketika undang-undang tersebut diterapkan. Perilaku para pemerintah harus memberikan efek positif dan citra yang baik agar masyarakat mengikuti langkah mereka, jika semua para pemerintah bertindak sesuai dengan undang-undang dan diikuti oleh masyarakat, maka hukum akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Semua lapisan sosial akan sadar pada hukum dan ada ke disiplinian dalam diri individu tersebut.

Keenam, untuk kelangsungan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PDUK, maka masyarakat harus membutuhkan adanya pendamping sosial. Di mana, program yang telah dilakukan tidak terputus begitu saja dan tidak musiman. Adanya pendamping sosial ini bertujuan agar program yang dilakukan semakin berkembang, maju serta terarah. Pendamping sosial ini terbentuk dari perwakilan warga yang mempunyai sifat jujur, pengayom, jiwa pemimpin, bijaksana, mempunyai skill dalam bidang lingkungan serta pemberdayaan, kreatif dan aktif dengan para warga. Pendamping sosial ini harus bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh PDUK, sehingga program pemberdayaan lingkungan ini nantinya akan dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2001
- Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. *Profil Dinas Kebersihan Tahun 2007*. Jakarta: Dinas Kebersihan. 2007
- Dwi Susilo, Rachmadk. *Sosilogi Lingkungan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2008
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2006
- HR.Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007
- Kasim, H.Muslim. *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya Studi Kasus Padang Pariaman*. Jakarta: Indomedia Global Jakarta. 2006
- Kurniawan, Fitri Lukiaastuti dan Muliawan Hamdani. *Managemen Strategik Dalam Organisasi*. Yogyakarta: MedPress (Anggota IKAPI). 2008
- Moesa, Soekarman. *Ilmu Lingkungan: Ekosistem, Manusia dan pembangunan Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Press. 2002
- Mokoginta, Lukman. *Jakarta Untuk Rakyat*. Jakarta: Sattwika. 1999
- Purwendro, Setyo dan Nurhidayat. *Mengolah Sampah Untuk Pupuk Pestisida Organik*. Jakarta: Oenebar Swadaya. 2009
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Sejati, Kuncono. *Pengolahan Sampah Terpadu dengan Sistem Nobe, Sub Point, Center Poin*. Yogyakarta: Kanisius. 2009
- Soetomo. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya ?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama. 2009

Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Media. 2004

Wardhana, Wisnu Arya. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi. 2004

Karya Ilmiah

Arwindo, Tommy Suryo. *Strategi Pengolahan Sampah Kota Bekasi Sesuai dengan Daya Dukung Wilayah*. Tesis UI. 2009

Fadlullaili. *Evaluasi Dampak Program Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Penghasilan Keluarga di RW 015 Kelurahan Klender Jakarta Timur*. Skripsi UNJ. 2008

Ikawati, Isyana. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengolahan Sampah di RW 013 Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Depok*. Skripsi UNJ. 2007

Salbiyah, Neneng. *Pengaruh Usaha Daur Ulang dan Produksi Kompos Terhadap Partisipasi Ibu Rumah Tangga Dalam Pengolahan Sampah (Survai di RW 02 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan)*. Skripsi UNJ. 1999

Lain-lain

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Pengolahan Sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Cakung Cilincing, 2010

Laporan Bulanan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Januari 2011

Laporan Tahunan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, 2007

Laporan Tim Kerja Program Pembangunan ITF, 2007

Modul Pengolahan Sampah di DKI Jakarta, 2008

Profil Kelurahan Cakung Timur, 2010

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, BPS Indonesia, 2010

Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan,
www.docstoc.com, 13 Mei 2011
www.bulletinmetropolis.com

